



**UPAYA OPTIMALISASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA**

(Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh

Wahyu Sri Wulandari

NPM 217.010.91.125



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2021

RINGKASAN

Wahyu Sri Wulandari, 2021, **Upaya Optimalisasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Batu)**, Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si Dosen Pembimbing I, Taufik Rahman Ilyasa, S.AP., M.AP Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama dan (3) untuk Mengetahui Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Dan Apa Perannya.

Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data yang akan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama yang diukur dengan tiga indikator efektifitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Disini kurang efektif karena kurangnya memaksimalkan sosialisasi pada penerima kube. Lalu untuk responsivitas daya tanggap dinas sosial dan pertanggung jawaban (akuntabilitas) sudah cukup baik. Lalu untuk kendala yang dihadapi terletak dari sumber daya manusianya. Dan untuk yang terlibat aktor ada yang dari pusat, penerima kebijakan (provinsi), yang menerapkan (kabupaten/kota) serta anggota, pengurus kube dengan pendamping kube.

Kata Kunci : Kinerja Dinas Sosial, Kendala, Aktor dalam kelompok usaha bersama (KUBE)

SUMMARY

Wahyu Sri Wulandari, 2021, Efforts to Optimize the Performance of the Social Service in Implementing the Empowerment Program for the Poor through a Joint Business Group (KUBE) (Case Study at the Social Service Office of Batu City), Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si Supervisor I, Taufik Rahman Ilyasa, S.AP., M.AP Supervisor II.

This study aims to (1) find out how the performance of the Batu City Social Service in the Implementation of the Empowerment Program for the Poor through Joint Business Groups (2) to find out the obstacles faced by the Social Service in Implementing the Empowerment Program for the Poor through Joint Business Groups and (3) to Know Who Is Involved In Implementing The Empowerment Of The Poor Through Joint Business Groups And What Is Their Role.

This research method using a qualitative approach and descriptive research type. The qualitative descriptive research method is the research method used to describe the events that occur in the field, the data collection will be carried out by interviewing, observation, and documentation techniques. Researchers use trust, transferability, dependence and certainty in order to check the reliability of the research data. Data analysis in this study used three components, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the performance of social services in implementing empowerment programs for the poor through collective business groups is measured by three indicators of effectiveness, responsiveness, and accountability. It is less effective here because of the lack of maximizing socialization to kube recipients. Then for the responsiveness of social agencies and accountability is good enough. Then the obstacles faced lie in human resources. And for those involved, there are actors from the center, policy recipients (province), implementing (district / city) as well as members, kube administrators with kube assistants.

Keywords: Social Service Performance, Constraints, Actors in the Joint Business Group (KUBE)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat adanya fenomena keadaan yang terjadi di negara Indonesia. Meskipun Indonesia sudah dikatakan merdeka, namun faktanya masih banyak warganya yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok. Kemiskinan juga merupakan suatu bentuk masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga menjadi suatu persoalan yang tidak asing lagi, suatu persoalan mendasar karena disatu sisi hal ini tidak hanya di alami satu daerah, melainkan diberbagai daerah yang pasti adanya persoalan tersebut. Hal ini juga termasuk sebagai indikator ketidakberhasilan suatu proses pembangunan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos 2002 : 3).

Kemiskinan adalah suatu produk salah dari pengelolaan pembangunan, yang menjadi masalah dan lemahnya administrasi publik, dari ketidak efektifnya berbagai kebijakan publik. Dengan demikian, pemerintah berusaha terus-menerus untuk mengurangi kemiskinan secara kuantitas dan kualitas dapat dilakukan dengan

menemukan strategi pembangunan yang paling sesuai dengan kebijakan yang paling efektif dan kebijakan publik yang memberikan solusi dari sebuah masalah kemiskinan yang ada saat ini.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dituntaskan karena keadaan kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kemah dan tidak bermartabat. Kondisi kemiskinan yang tengah dihadapi Indonesia dapat kita lihat dari pendekatan konsumsi penduduk miskin, kemiskinan multidimensi dan kesenjangan anatar-wilayah. (Wrihatnolo, 2008 hal 15-19)

Salah satu strategi untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat (community development) bertujuan untuk mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek melainkan subjek. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan/aset keluarga miskin. Keberdayaan penduduk miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri. (Wrihatnolo, 2008, hal 22)

Dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah memiliki beberapa upaya dengan mengeluarkan Perpres No 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, Perpres No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan. Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Perpres No 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. Permensos 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan Fakir Miskin, dan pembentukan program-program pemberdayaan lainnya seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pemberian Beras Miskin (Raskin), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan masih banyak program-program pemberdayaan lainnya.

Untuk terlaksannnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di indonesia, menurut data dari BPS jumlah penduduk miskin Indonesia pada september 2019 sebesar 24,97 juta orang, presentase penduduk miskin pada september 2019 yaitu 9,22%. (www.bps.go.id). Dilihat dari kenyataannya penanganan masalah kemiskinan harus benar-benar diperhatikan, tidak hanya dengan sepihak secara ekonomi melainkan harus memperhatikan masalah-masalah lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan. Pemerintah menetapkan program

pemberdayaan fakir miskin (P2FM) ini merupakan lanjutan dari program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Program ini berbasis pada program pemberdayaan. Mengingat program pemberdayaan fakir miskin (P2FM) cukup banyak. Dalam hal ini sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan pemerintah mengarahkan program pemberdayaan fakir miskin (P2FM) melalui kube atau kelompok usaha bersama.

Kelompok usaha bersama (kube) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Usaha ekonomi produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Kube beranggitakan 5 sampai 20 kepala keluarga dalam masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu (DTPFMOTM). (Kemensos.go.id)

Tujuan pelaksanaan KUBE yaitu :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan fakir miskin dari segala kondisi keterbatasannya secara bersama-sama.
2. Meningkatkan pendapatan anggota KUBE fakir miskin melalui usaha yang mandiri.

3. Meningkatkan kemampuan KUBE fakir miskin dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar dan pasar perbankan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

(buku petunjuk teknis p2fm melalui KUBE, 2008:2)

Adapun tahapan pelaksanaan KUBE adalah :

1. Perorangan masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas sosial Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa.
2. Dinas sosial kabupate/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerimaan KUBE sesuai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).
3. Dinas sosial kabupaten/kota mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi.
4. Direktoat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I melakukan verifikasi dan validasi usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
5. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menetapkan lokasi dan penerima KUBE.
6. Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) KUBE.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin (P2FM) melalui Kube ini akan diberikan pendampingan dari Dinas Sosial. Pendampinga KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan KUBE agar dapat mengontrol atau memberi arahan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. (Kemensos.go.id)

Dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama atau KUBE memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Dengan itu pembentukan kelompok usaha bersama atau kube ini akan diberikan dana untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Tidak hanya sekedar diberi modal atau dana pada program pemberdayaan fakir miskin melalui kempok usaha bersama. Masyarakat juga akan diberikan pelatihan dan motivasi untuk membuat usaha yang dapat menunjang perekonomian masyarakat miskin, dan bisa menjadi pekerjaan dan penghasilannya sendiri. Kube ini juga bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan bersama atau berkelompok.

Hampir semua daerah di Indonesia juga melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin (P2FM). Salah satunya pada kota Batu di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data jumlah kepala keluarga miskin tahun 2019 berjumlah 3100

KK dari jumlah penduduk kota batu keseleuruhan 219.470 penduduk Batu yang tercantum pada data dinas sosial kota batu.

Pelaksanaan KUBE di kota Batu di mulai tahun 2017, ada 3 kecamatan di kota Batu antara lain yaitu kecamatan batu, kecamatan bumiaji dan kecamatan junrejo. Kube yang masih aktif di kota Batu pada saat ini berjumlah 53 kelompok usaha bersama (KUBE). Kelompok usaha bersama di Kota Batu terbagi menjadi 2 jenis kube yaitu Kube Jasa dan Kube Produksi. Bentuk kegiatan kube jasa antara lain yaitu Laundry, E-warung yang berbentuk dagang sembako, Selep gilingan. Sedangkan kube produksi yaitu antara lain membuat makanan ringan, produksi bawang merah, membuat aksesoris anyaman, membuat telur asin, pengolahan kopi, membuat keripik, membuat sabun cuci dan masih banyak lagi. Sebagian dari terbentuknya kelompok usaha bersama yaitu gabungan dari kegiatan PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu E-Warong, dimana didalam E-warong tersebut rata-rata anggotanya Adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1.1

Data Kecamatan, Jumlah KUBE

NO	Kecamatan	Jumlah KUBE
1.	Batu	24 KUBE
2.	Bumiaji	13 KUBE
3.	Junrejo	16 KUBE
	Jumlah	53 KUBE

Sumber : Rekapitulasi Data Program KUBE dari Dinas Sosial Kota Batu

Dari tabel berikut hampir kelompok usaha bersama di kota Batu belum berkembang, sebagian kecil ada yang sudah berkembang. Tetapi pelaksanaan kegiatan kelompok usaha bersama memiliki banyak faktor dan kendala terkait pengembangan kelompok usaha bersama di kota Batu.

Berdasarkan dari sumber berita Koran online malangtimes.com pada 17 September 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 KUBE di kota Batu menerima pemkot Batu bantuan sarana prasarana mencapai 94, 8 Juta. Sebanyak 18 KUBE¹ (Kelompok Usaha Bersama) penerima sarpras mendapat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu 2019 (Ungkap Kepala Dinas Kota Batu Ririck Mashuri). Sarana Prasana yang diberikan berupa : Mesin Cuci, mesin perajang kripik, kompot gas, blender, alat masak dan sebagainya. Setiap tahunnya

¹ Koran Online malangtimes.com. *Ini sentuhan Pemkot Batu terhadap kelompok usaha bersama.* Terbit. 17 September 2019

mereka mengajukan program kube dan penerima manfaat telah mandiri atau mampu mengembangkan usahanya sendiri. Menurut Bapak Ririck Mashuri Selaku Kepala Dinas Kota Batu mengatakan bahwa, mudah-mudahan dengan bantuan ini kegiatan usaha dapat berkembang, hanya selama ini yang menjadi persoalan adalah komitmen dan konsistensi dalam membuat produk itu, Cuma masalah komitmen dari mereka, konsistensi dalam membuat produk itu dan quality control ”.

Namun berdasarkan temuan peneliti dilapangan sesuai wawancara pada tanggal (07 Desember 2020) dengan tim pendamping kelompok usaha bersama yaitu mas Oni menyatakan bahwa :

“ Kelompok usaha bersama di kota Batu itu mbak sudah ada dan berjalan sejak tahun 2017, tetapi awal itu masih di beberapa kelurahan di setiap kecamatan belum semua kecamatan ada program kelompok usaha bersama. Dan itu bertahap mbak setiap kecamatan. Dari 2017 sampe sekarang mbak kube di Kota Batu sudah mencapai 53 kube tetapi kube yang masih aktif hingga saat ini itu hanya 36. Lah ini mbak yang membuat kube tidak aktif karena Dinas Sosial belum mempunyai rujukan yang kuat untuk pengelolaan kube sendiri dan ada masalah terkait sumber daya manusianya yaitu pendampingan berjalannya kube ini masih kurang ya karena jadi ya kube di kota Batu itu rata-rata belum berkembang”

(Sumber : Wawancara dengan Tim Pendamping KUBE yaitu Mas Oni tanggal 07 Desember 2020)

Terkait pemamaparan dari wawancara tersebut permasalahan yang ada di kelompok usaha bersama ini yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Belum Memadai

Dikatakan dalam hasil pemamaparan wawancara sumber daya manusia belum memadai disini dikatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hal tersebut Kinerja

Sumber daya Manusia Aparatur didalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama ini belum maksimal.

2. Belum mempunyai rujukan yang kuat dalam pengelolaan program KUBE

Permasalahan yang kedua disebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Batu disini belum mempunyai rujukan yang kuat dalam pengelolaan program kube, dimaksudkan bahwa Dinas Sosial Kota Batu masih belum mempunyai suatu bentuk pegangan dalam pengembangan program KUBE.

Kelompok Usaha Bersama di Kota Batu berdasarkan pengamatan pertama yang sudah peneliti lakukan termasuk belum berkembang. Dikarenakan dari pendampingan kelompok usaha yang masih kurang, dan belum adanya rujukkan untuk proses pengelolaan kelompok usaha bersama di Kota Batu dari dinas sosial Kota Batu sendiri (menurut pemaparan yang dilakukan oleh mas Oni selaku tim pendamping kelompok usaha bersama bagian kube produksi)

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi pemerintah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu belum maksimal melihat masih banyaknya program kelompok usaha bersama yang masih belum berkembang dan kelompok usaha bersama yang tidak aktif. Berdasarkan realita dan penjelasan diatas maka suatu hal yang sangat menarik untuk penulis meneliti sejauh mana kinerja dinas sosial dalam pengembangan kelompok usaha bersama di Kota Batu, karena program tersebut adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok

masyarakat miskin dengan meningkatkan kemampuan berusaha secara bersama dalam kelompok, dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLSP) untuk mengelola Usaha Ekonomi produktif (UEP) dengan ini peneliti mengangkat judul penelitian “UPAYA OPTIMALISASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Batu)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja dinas sosial kota batu dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin dalam pengembangan kelompok usaha bersama di kota Batu ?
2. Apa saja kendala/hambatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin dalam pengembangan kelompok usaha bersama di kota Batu ?
3. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin dalam pengembangan kelompok usaha bersama di kota Batu dan bagaimana perannya ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian, diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dinas sosial dalam mengoptimalkan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kota batu dalam mengoptimalkan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama
3. Untuk mengetahui sejauh mana proses program pemberdayaan fakir miskin melalui pengembangan kelompok usaha

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran di bidang program pemberdayaan fakir miskin
 - b. Sebagai referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi

Diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait dalam mengembangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan fakir miskin .
 - b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
 - c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam hal-hal penyelenggaraan program pemberdayaan fakir miskin .

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Upaya Optimalisasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi kasus dinas sosial kota batu).

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini akan memuat beberapa uraian dasar teori yang berhubungan dengan judul memuat beberapa konsep strategi, optimalisasi dan kinerja sosial dalam melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan pendekatan penelitian, fokus penelitian, pemilihan informasi, sumber data, teknik pengumpulan data dan adapun analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan pada hasil penelitian tentang **”Upaya Optimalisasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi kasus dinas sosial kota batu).”**

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan terkait pembahasan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya serata memberikan saran-saran yang sekiranya nanti dapat bermanfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, Kinerja Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dalam Pengembangan Kelompok Usaha Bersama di Kota Batu. Cukup baik walaupun terdapat kekurangan-kekurangan yang masih ada.

Dalam penelitian ini ada tiga indikator yaitu Efektivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Pada 3 tahun terakhir kinerja Dinas Sosial diukur dari tiga indikator yaitu:

No	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Selama 3 Tahun Terakhir	Produktivitas	Reponsivitas	Akuntabilitas
1.	Tahun 2018	Efektivitas program pelaksanaan kube pada tahun 2018 sesuai dengan hasil wawancara	Pada tahun ini Dinas Sosial cukup tanggap dengan melaksanakannya program kube di Kota Batu, sudah	Pertanggung jawaban pelaksanaan program kelompok usaha bersama pada tahun ini sudah adanya laporan pertanggung

		<p>sudah cukup baik karena pada tahun ini kelompok usaha bersama menurut selaku pendamping kube beberapa kelompok usaha bersama yang di mulai di kecamatan batu mulai berkembang di kecamatan lainnya mulai dari kecamatan Junrejo yang, kecamatan Bumiaji beberapa kelurahan sudah membentuk kube. Jadi pada tahun ini pelaksanaan kube cukup efektif</p>	<p>membantu untuk pengembangan kube produksi dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Batu untuk proses pengecekan makanan yang di produksi apakah layak untuk dimakan atau tidak.</p>	<p>jawaban untuk perkembangan kelompok usaha bersama di Kota Batu. Yang paling masif setiap harinya adalah E-warong KUBE dimana E-warong ini pengurus dan KPMnya PKH jadi kegiatan yang paling rutin dilakukan dan aktif itu E-warong KUBE</p>
2.	Tahun 2019	<p>Pada tahun ini kelompok usaha bersama di Kota Batu ini mulai berkembang hingga 53 kube di kota batu tetapi untuk berkembangnya setiap kube masih belum ditemukan oleh Dinas Sosial. Beberapa kube</p>	<p>Untuk daya tanggap Dinas Sosial pada pelaksanaan program kelompok usaha bersama ini sudah cukup baik dimana pada tahun 2019 bekerjasama dengan dinas kesehatan tetapi pada tahun ini</p>	<p>Pada tahun ini melihat dari lakip yang dibuat Dinas Sosial Kota Batu dari hasil capaian kinerja pada tahun 2019 jumlah keluarga miskin yang terbedayakan 4092 keluarga miskin. Dari 4092 ada 100 orang penerima bantuan sarana dan prasarana</p>

		<p>yang sudah mampu mengembangkan usahanya dengan pemahaman dan pengetahuan mereka. Jadi menurut peneliti kelompok usaha bersama ini sudah sudah mulai ada di beberapa kecamatan di Kota Batu namun belum efektif secara pelaksanaan usaha karena ada sebagian yang belum mengerti tentang adanya kelompok usaha bersama ini</p>	<p>bekerjasama dengan disperindag untuk proses labelisasi, agar barang yang di produksi kube ini bisa bernilai jual tinggi.</p>	<p>pendukung usaha bagi keluarga miskin tersalurkan melalui kelompok usaha bersama dengan berbagai jenis usaha. Dengan adanya lakip yang dibuat Dinas Sosial pada tahun 2019. Laporan pertanggungjawaban dinas sosial sudah cukup baik</p>
3.	Tahun 2020	<p>Pada tahun 2020 ini dari 54 kube yang masih aktif terdapat hanya 36 kube yang masih aktif di Kota Batu. Hal ini tentu sangat tidak efektif. Karena pada kriteria efektif sepertinya belum terpenuhi dengan pemerosotan kube yang aktif menjadi tidak</p>	<p>Masih dilakukannya kerjasama dengan disperindag dan dinkes untuk membantu nilai jual pada usaha masyarakat pada kelompok usaha bersama ini</p>	<p>Pada tahun 2020 laporan pertanggungjawaban belum selesai dikerjakan mengingat ada beberapa program yang harus diselesaikan sesuai wawancara yang dilakukan peneliti ke kepala bidang bantuan dan jaminan sosial. Namun setiap tahun pasti membuat laporan pertanggungjawaban yang di</p>



		aktif .		serahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jaawa Timur.
--	--	---------	--	--

1. Indikator Efektivitas

Pada indikator ini yang ditemukan dalam penelitian terdapat beberapa kesimpulan diantaranya nilai dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu melakukan beberapa upaya yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan yang dilakukan dinas sosial adalah seleksi keluarga bina sosial penerima KUBE, seleksi pendamping dan sosialisasi. Untuk proses seleksi keluarga bina sosial penerima kube di Kota Batu di bantu oleh pihak kelurahan setempat. Sedangkan untuk seleksi pendamping kube di lakukan dari Pihak Dinas Sosial tepatnya oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial. Lalu untuk sosialisasi sendiri dilakukan pada kelurahan setempat, yang mana pada saat sosialisasi kurang maksimal karena dari Dinas Sosial Kota Batu hanya melakukan satu kali pada saat awal-awal akan dilaksanakan program Kube. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah

pemberian stimulan bantuan modal usaha. Pada pemberian bantuan modal usaha ini diberikan oleh Dinas Sosial kepada KUBE sebesar 20 juta per KUBE yang nantinya akan dibentuk kelompok menjadi 1 kelompok yang beranggotakan 5-10 orang. Untuk tahap ketiga yaitu tahap evaluasi kegiatan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu pada tahap ini adalah melakukan monitoring secara periodik dan melakukan pembinaan serta pengarahan kepada pengurus dan anggota KUBE. Dapat disimpulkan pada indikator efektivitas masih kurang baik buktinya dari 54 kube yang ada di Kota Batu tahun 2020 masih 36 yang aktif untuk usahanya.

2. Indikator Responsivitas

Pada indikator responsivitas upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu antara lain dapat dilihat dari bentuk daya tanggap Dinas Sosial dalam melaksanakan program KUBE. Bentuk responsivitas Dinas Sosial Kota Batu terhadap pelaksanaan program Kube di Kota Batu sudah baik diresponsivitas, karena pihak Dinas Sosial sendiri sangat memberikan tanggapan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok usaha bersama (KUBE). Bentuk tanggapan yang bisa menjadi tolak ukur sudah baiknya indikator responsivitas ini yaitu : memfasilitasi para pengurus kelompok usaha bersama (KUBE) yang ada di Kota Batu dengan membantu mengajukan bantuasarana prasaran kepada Dinas Provinsi agar bisa dikabulkan atau diterima untuk usulan sarana prasarana kebutuhan kelompok usaha bersama (KUBE). Tidak hanya itu bentuk responsivitas yang dilakukan

Dinas Sosial untuk KUBE Produks. Dinas Sosial berinisiatif untuk bekerjasama dengan Disperindag, dimana fungsi kerjasama ini terkait untuk labelisasi produksi kelompok usaha bersama(KUBE). Agar nilai jual bisa tinggi dipasaran lalu produk lebih mudah untuk dipasarkan. Seperti dibukakan seperti toko oleh-oleh, karena Kota Batu termasuk Kota Agrowisata dimana wisatawan pasti suka membeli oleh-oleh khas daerah. Tak lupa juga Dinas Sosial ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menjamin rasa dan kualitas makanan atau minuman yang di produksi oleh anggota kube agar terjamin untuk dinikmati. Seperti itulah pada indikator resposivitas yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu.

3. Indikator Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE. Pada indikator akuntabilitas yang tidak lain diartikan sebagai pertanggung jawaban. Disini Dinas Sosial tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dalam proses upaya penanggulangan kemiskinan. Namun terkait pelaksanaan program Kube, Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap laporan pelaksanaan program Kube cukup baik. Karena pada setiap tahunnya dari mulai tahun 2017 Dinas Sosial membuat laporan pertanggung jawaban yang diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Untuk berbagai pihak yang terlibat dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE)

mempunyai peran, tugas dan wewenang masing-masing. Baik aktor yang berasal dari pusat maupun aktor yang terlibat dari daerah. Untuk aktor yang berasal dari pusat yaitu Kementerian Sosial yang bertindak sebagai pembuat kebijakan. Melalui Kementerian Sosial ini kebijakan akan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi. Selanjutnya aktor yang berasal daerah ialah Dinas Sosial Kota Batu selaku implementor. Selain itu juga ada pihak terlibat dari kecamatan dan desa berperan dalam pengusulan proposal kube ialah pendamping-pendamping yang sudah di tunjuk

Untuk kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama ini yaitu 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUBE, 3) Kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi dalam pelaksanaan program KUBE.

B. Saran

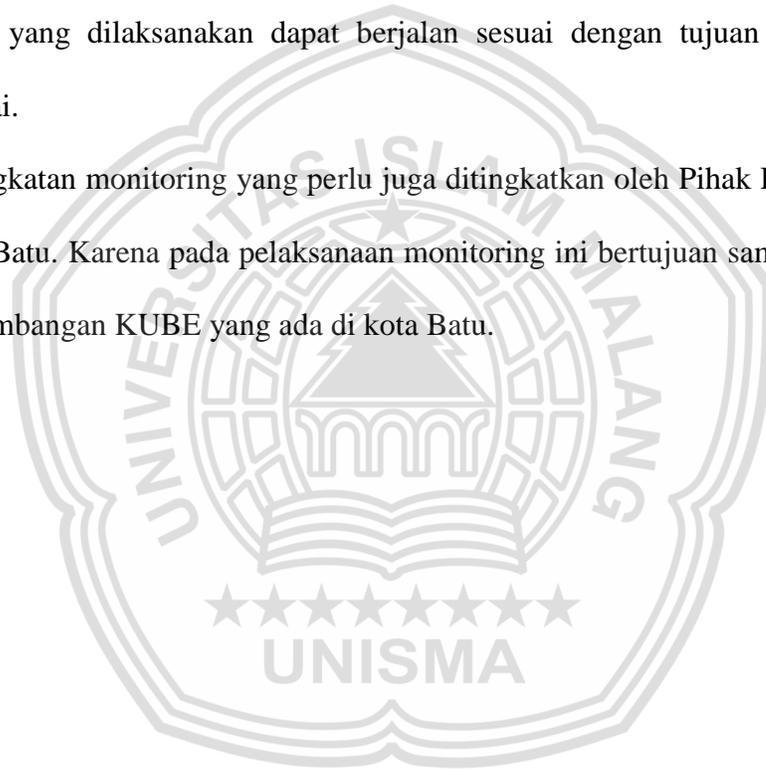
Setelah melakukan penelitian dan analisis data, penulis berkenan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Batu :

1. Perlunya dilakukan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia sendiri pada anggota kelompok usaha bersama (KUBE). Pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau anggota dalam kelompok usaha bersama ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, pengarahan, serta pelatihan kepada anggota KUBE, menurut jenis usaha yang dipilih. Ha itu bertujuan



untuk anggota dan pengurus kube dapat lebih baik dan berkembang dengan usaha yang dipilih mereka

2. Perlunya peningkatan sosialisasi oleh pendamping KUBE yang dipilih dari Dinas Sosial. Setidaknya satu bulan minimal satu pertemuan. Hal ini bertujuan agar anggota dan pengurus kube lebih paham dalam menjalankan usahanya dan dapat lebih mengerti terhadap tugas dan kewajibannya. Agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Peningkatan monitoring yang perlu juga ditingkatkan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Batu. Karena pada pelaksanaan monitoring ini bertujuan sampai dimana perkembangan KUBE yang ada di kota Batu.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Bahri Efri Samsul. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Indonesia, K. S. (2016). *Pedoman Teknis Pemberdayaan Fakir Miskin*. Surabaya: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- Kementrian Sosial. (2010). *Modul Pendampingan Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial.
- Moelong, L. (2014). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujiyadi, S. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin; Studi Evaluasi Penanggulangan di Lima Provinsi*. Jakarta Timur: P3KS Press.
- Santoso Djonet. (2017). *Penduduk Miskin Transient; Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinambela. (2012). *Kinerja Pegawai; Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno Muhammad. (2012). *Strategi Pemerintahan; Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Pusat Studi Metropolitan.
- Uno Hamzah, N. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Jurnal

- Bagus, d. (2020). *Evaluas Program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Batu Kota Batu*. Vol 6: No 3.
- Mustafa, A. A. (2015). *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBR_FM) di Kota Makassar*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Universitas Hasanudin Makassar.
- Ningtyas, A. R. (2017). *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro)*. Program Studi Administrasi Publik: Universitas Brawijaya.
- Oktavia, A. N. (2011). *Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) (Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Dalam Pengembangan Kube)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Sebelas Maret.
- Sari, A. L. (2013). *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lingga (Studi pada kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Lingga*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Maritim Raden Ali Haji Tanjung Pinang.
- Wulan, Y. C. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Studi tentang pemberdayaan ekonomi kelompok usaha bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur)*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Universitas Islam Malang.

Sumber Internet

- Badan Pusat Statistik. (t.thn.). *geografi Kota Batu*. Dipetik April 26, 2018, dari batukota.bps.go.id:
<https://batukota.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>
- Badan Statistik Pusat. (t.thn.). *Kemiskinan*. Dipetik Januari 06, 2020, dari batukota.bps.go.id:
<https://batukota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>
- Diskominfo Kota Batu. (t.thn.). *Profil Dinsos*. Dipetik 2019, dari dinsos.batukota.go.id: <https://dinsos.batukota.go.id/profil/>
- Irwan Susanto. (t.thn.). *Kelompok Usaha Bersama*. Dipetik 08 28, 2019, dari kemensos.go.id: <https://kemensos.go.id/kube>
- Wikipedia. (t.thn.). *Geografis Kota Batu*. Diambil kembali dari id.wikipedia.org:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu#Geografi



Sumber Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34

Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pepres No 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Permensos Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk penanganan Fakir Miskin

